

**KESADARAN POLITIK GURU PPKn DI KABUPATEN JOMBANG****Vety Ika Permatasari**

1004254035 (Prodi SI PPKn, FIS, UNESA) ikavety@yahoo.com

**Agus Satmoko Adi**

0016087208 (Prodi SI PPKn, FIS, UNESA) agussa@ciputra.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesadaran politik yang dimiliki oleh guru PPKn di Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa angket skala sikap dan wawancara. Angket skala sikap digunakan untuk mengetahui tingkat kesadaran politik guru PPKn di Kabupaten Jombang. Wawancara digunakan untuk memperkuat hasil penelitian terkait dengan tingkat kesadaran politik. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah dua puluh sembilan responden. Hasil dari penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa guru PPKn di Kabupaten Jombang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dari hasil perolehan uji skala sikap kesadaran politik guru PPKn bahwa sebelas orang guru memiliki tingkat kesadaran politik yang sangat tinggi, tujuh belas orang guru memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi, dan satu orang guru memiliki tingkat kesadaran politik yang sedang. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa guru memiliki tingkat kesadaran politik yang sangat tinggi pada ranah orientasi kognitif pada level pengetahuan dengan prosentase sebesar 91,43%, diikuti dengan tingkat kesadaran politik yang tinggi pada ranah orientasi afektif pada level sikap dengan prosentase sebesar 85,43%, dan tingkat kesadaran politik sedang pada ranah orientasi evaluatif pada level penilaian dengan prosentase sebesar 66,33%. Hasil penelitian yang menunjukkan tingkat kesadaran politik yang tinggi ini juga dapat disimpulkan bahwa profesi sebagai guru PPKn mempunyai kontribusi terhadap kesadaran politik yang mereka miliki.

Kata Kunci : Kesadaran politik dan Guru PPKn.

**Abstract**

This research aims to understand the political awerenes of teacher Pancasila and Civic Education in Jombang distric. This study using quantitative method. Thecnique of collecting data used are self assesment questionnaire and interview. The number of self assesment used to determine political awerenes of Pancasila and Civic Education teacher in Jombang distric. Interview used to strengthen result of study concern political awerenes. Samples used in this study amounted to twenty nine respondents. The result of quantitative research showed that Pancasila and Civic Education teacher in Jombang had a high political awerenes. This could be seen in result of this study in self assesment questionnaire political awerenes of the Pancasila and Civic Education teacher that eleven teacher had very high political awerenes, seventeen teacher had high political awerenes, and one teacher had average political awerenes. Result of the study show that teacher also had high political awerenes in cognitive orientation with percentage 91,43%, as follow with high political awerenes percentage 85,43%, and with average political awerenes percentage 66,33%. The result of this study show this high political awerenes also conclude that teacher of Pancasila and Civic Education proffesion had contribution is political awerenes.

Keywords : Political Awerenes and Theacher of Pancasila and Civic Education.

**PENDAHULUAN**

Politik merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang. Politik dapat diartikan sebagai strategi atau cara yang dilakukan seorang atau sekelompok orang untuk dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Berdasarkan pengertian dari politik tersebut, maka dapat dikatakan bahwa politik

mempunyai hubungan yang sangat erat di dalam kehidupan masyarakat. Di dalam kehidupan bermasyarakat selalu berkenaan dengan politik itu sendiri, sehingga dapat dikatakan bahwa politik itu hidup di dalam masyarakat atau bisa dikatakan bahwa masyarakat hidup dengan menggunakan politik.

Di dalam ruang lingkup politik tidak dapat dihindarkan dari pembahasan yang meliputi tentang

kebijaksanaan, kekuasaan, pemerintahan, konflik, kerjasama dan pembagian. Kehidupan politik meliputi semua aktivitas yang berpengaruh terhadap kebijaksanaan dari yang khusus yang diterima baik bagi suatu masyarakat dan terhadap cara pelaksanaan kebijaksanaan (Easton,1953:128 dalam Politikologi Hoogerwerf). Hal ini dikarenakan oleh hakekat politik adalah koordinasi yang dapat dipercaya dari semua usaha dan pengharapan manusiawi untuk memperoleh tujuan-tujuan masyarakat (Deutsch, 1966:24 dalam Politikologi Hoogerwerf).

Terkait dengan konsep dan hakekat kehidupan politik tersebut dapat disimpulkan bahwa politik selalu berhubungan dengan kegiatan pemerintahan, antara lain kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengimplementasikan aspirasi rakyat agar tujuan-tujuan yang diinginkan oleh rakyat dapat dicapai. Melalui jalur politik inilah tujuan yang diinginkan oleh masyarakat diwujudkan oleh pemerintah dengan menciptakan suatu kebijaksanaan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini merupakan implementasi dari politik. Kebijakan merupakan suatu rencana yang terorganisasi dan terarah yang secara tekun berusaha menghasilkan, mempertahankan atau mengubah susunan kemasyarakatan (Oertzen, 1965:107 dalam Politikologi Hoogerwerf).

Kehidupan politik yang baik di mata masyarakat adalah ketika pemerintah mampu mengimplementasi kebijakan yang telah dibuat pemerintah. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus disesuaikan dengan kondisi rakyat dan bertujuan untuk mensejahterakan hidup rakyat. Kebijakan yang dibuat adalah demi kepentingan dan kebaikan rakyat. Implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan hidup rakyat ini merupakan salah satu indikator yang dapat dijadikan tolak ukur kehidupan politik yang baik di dalam masyarakat, sebab politik memang difungsikan dengan sebagaimana mestinya yaitu sebagai alat atau strategi untuk mencapai suatu tujuan bersama.

Berdasarkan korelasi antara politik dengan masyarakat tersebut, politik memberikan dampak di dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contoh nyata yang ada adalah pada era Orde Baru, pada saat itu masyarakat mengalami tekanan yang dahsyat dari pemimpin dengan pemerintahan yang otoriter sehingga mahasiswa yang mewakili rakyat melakukan demonstrasi untuk memperoleh kebebasan dan menginginkan pergantian kekuasaan

yang pada mulanya otoriter menjadi demokratis. Kekuasaan yang berada di bawah kendali rakyat. Pemerintah adalah sebagai wakil rakyat yang harus menampung semua aspirasi rakyat bukanlah sebagai penguasa yang mengatur rakyat. Oleh karena itu dari masa reformasi sampai saat ini Indonesia menggunakan bentuk pemerintahan demokrasi.

Demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dimana di dalam kehidupan demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang mengedepankan kepentingan rakyatnya. Indonesia merupakan salah satu negara penganut bentuk pemerintahan demokrasi, dimana demokrasi ini memberikan kebebasan kepada rakyat. Oleh karena itu dalam setiap pembuatan kebijakan serta pengambilan keputusan harus mengikutsertakan partisipasi rakyat. Jadi di dalam pemerintahan demokrasi, pemerintah hanya wakil dari rakyat saja dalam mewujudkan semua keinginan rakyat sehingga harus mampu menampung semua aspirasi rakyat.

Untuk mendukung berjalannya demokrasi, diperlukan suatu cara sebagai penunjang berjalannya demokrasi. Salah satunya adalah dengan cara memunculkan kesadaran politik rakyat untuk ikut serta aktif berpartisipasi dalam kehidupan politik maupun kenegaraan. Partisipasi rakyat sangat penting dalam pembuatan suatu kebijakan sebab kebijakan harus menampung semua aspirasi rakyat. Kesadaran politik rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam membuat suatu kebijakan dibangun dengan cara demokratisasi. Demokratisasi merupakan suatu proses penanaman prinsip-prinsip demokrasi kepada masyarakat. Salah cara yang dilakukan dalam usaha demokratisasi ini adalah sosialisasi politik.

Sosialisasi politik merupakan proses untuk memasyarakatkan nilai-nilai atau budaya politik kedalam suatu masyarakat. Sosialisasi politik penting dilakukan untuk menunjang proses demokratisasi dan proses pemerintahan demokrasi di Indonesia. Sosialisasi politik juga penting dilakukan karena dalam pemerintahan demokrasi, rakyat dituntut aktif berpartisipasi dalam setiap kegiatan kenegaraan. Oleh karena itu sosialisasi politik sangat penting diadakan dengan salah satu tujuan yaitu membangun kesadaran politik di dalam diri masyarakat agar rakyat sadar akan peranan hak dan kewajiban yang ia miliki dalam kehidupan politik dan bernegara. Sosialisasi politik juga diharapkan dapat diharapkan ketika rakyat memiliki kesadaran

politik maka proses demokrasi dapat berjalan dengan baik.

Kesadaran politik sangat diperlukan bagi setiap WNI untuk menunjang pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Kesadaran politik tidak hanya meliputi tentang partisipasi politik sebagai WNI dalam Pemilu saja, tetapi juga meliputi tentang pengetahuan politik serta juga sejauh mana mereka aktif mengawasi atau mengoreksi kebijakan dan perilaku pemerintahan selama 5 tahun ini berlangsung. Tingkat kesadaran politik yang dimiliki oleh rakyat dapat mempengaruhi kehidupan politik. Apabila rakyat memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi maka hal ini dapat mewujudkan kehidupan politik yang baik.

Tingginya kesadaran politik yang dimiliki oleh rakyat biasanya akan berdampak terhadap partisipasi rakyat di dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Partisipasi rakyat diperlukan dalam setiap pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Hal ini dikarenakan di dalam suatu kebijakan harus dapat menampung aspirasi rakyat. Apabila aspirasi rakyat mampu ditampung oleh pemerintah, dengan cara rakyat mempunyai kesadaran aktif berpartisipasi dalam kegiatan politik dan kenegaraan, maka kemungkinan besar hal ini akan mampu menciptakan kehidupan politik yang baik. Kehidupan politik yang baik ini tentu akan mampu menciptakan kehidupan yang serasi antara pemerintah dan rakyat dimana rakyat dan pemerintah saling kerjasama dalam perwujudan politik yang baik demi kebaikan bersama.

Salah satu faktor yang menjadi besarnya kesadaran politik yang dimiliki oleh seseorang adalah ditinjau dari latar belakang pendidikan seseorang. Dengan mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi maka seseorang akan berkemungkinan besar mempunyai kesadaran politik yang baik. Guru merupakan salah satu orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi. Melalui Guru PPKn proses sosialisasi politik dapat terjadi dengan materi PPKn yang diajarkan kepada siswa untuk membangun kesadaran politik siswa. Jadi dapat dikatakan bahwa guru PPKn merupakan salah satu agen sosialisasi politik untuk menanamkan kesadaran politik kepada siswa. Hal ini sesuai dengan pendapat sebagai berikut:

“Lamanya masa sekolah seorang anak dan banyaknya pengalaman mereka dengan guru merupakan pengaruh besar terhadap perkembangan rasa

individu mengenai kompetensi politik”. (Kavanagh, 1982:41).

Mata pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang mengajarkan tentang bagaimana cara menjadi warga negara yang baik. Di dalam mata pelajaran PPKn, siswa dapat belajar mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Selain itu, PPKn juga mengajarkan tentang semua yang terkait dengan pemerintahan Indonesia, seperti sistem pemerintahan, struktur organisasi pemerintahan dan lain-lain. Sosialisasi politik diajarkan melalui PPKn sebagai pengenalan kepada siswa-siswi tentang hakekat politik itu dengan salah satu bab yang diajarkan dalam materi pembelajaran PPKn. Oleh karena itu mata pelajaran PPKn dianggap mempunyai urgensi dalam sosialisasi politik.

Guru PPKn merupakan salah satu ujung tombak dalam membangun dan meningkatkan kesadaran politik siswa. Guru PPKn memiliki tanggung jawab membangun dan meningkatkan kesadaran politik siswa dengan salah satu cara yaitu mensosialisasikan cara menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mengerti akan hak dan kewajiban. Melalui mata pelajaran PPKn sosialisasi politik ini disampaikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun pondasi kepada siswa untuk menciptakan bangsa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Tugas pokok guru PPKn adalah mengajar dan menyampaikan materi PPKn kepada siswa. Materi PPKn yang disampaikan berisi tentang orientasi bagaimana menjadi warga negara yang baik sehingga dapat dikatakan bahwa tugas pokok guru PPKn adalah mencetak para siswa dimana kelak dapat menjadi warga negara yang baik dengan cara mengaplikasikan apa yang telah disampaikan guru PPKn melalui mata pelajaran PPKn di dalam proses pembelajaran di kelas.

Profesi guru PPKn tentu mempunyai hubungan di dalam kehidupan politik bernegara, sebab guru PPKn merupakan salah satu ujung tombak sosialisasi politik. Suksesnya demokratisasi juga dipengaruhi dari guru PPKn dalam melakukan sosialisasi politik melalui mata pelajaran PPKn yang disampaikan kepada siswa. Kesadaran politik wajib sekali ditanamkan di dalam diri siswa, sebab siswa merupakan generasi muda penerus bangsa. Jadi dengan tumbuhnya kesadaran politik yang baik di dalam diri siswa, diharapkan mampu menjadikan generasi penerus bangsa yang sadar akan politik dan

nantinya dapat menciptakan kehidupan politik yang lebih baik di dalam kehidupan bernegara.

Peran guru tidak hanya sebatas sebagai pengajar dan pendidik, tetapi guru juga mempunyai peranan sebagai agen sosialisasi politik. Guru merupakan seorang tenaga kerja yang bekerja di dalam lingkup sekolah. Sekolah merupakan salah satu bagian dari agen sosialisasi politik yang bersifat jalur formal yaitu melalui pendidikan. Sekolah mempengaruhi kepekaan anak-anak akan pentingnya politik, kepercayaan mereka bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam politik dan bahwa partisipasi mereka itu dapat membuat suatu perbedaan (Ibid, 2001:137 dalam Kebudayaan Politik Kavanagh).

Guru merupakan aktor di dalam sekolah. Mereka dijadikan sebagai panutan oleh semua siswa. Apa yang dikatakan guru selalu diteladani oleh siswa. Guru merupakan agen sosialisasi politik karena melalui guru siswa dapat menerima informasi politik, salah satunya dengan materi PPKn yang disampaikan oleh guru PPKn. Melalui mata pelajaran PPKn, guru melakukan sosialisasi politik kepada siswa. Guru memberikan pengetahuan awal yang membangun pemikiran para siswa yang berorientasikan pada politik. Hal ini sesuai dengan pendapat yang mengatakan bahwa: "Lamanya masa sekolah seorang anak dan banyaknya pengalaman mereka dengan guru merupakan pengaruh besar terhadap perkembangan rasa individu mengenai kompetensi politik". (Kavanagh, 1982:41).

Sosialisasi politik yang dilakukan oleh guru PPKn ini adalah untuk menumbuhkan kesadaran politik di dalam diri siswa. Sehingga nanti diharapkan apabila kesadaran politik telah terbangun dalam diri masing-masing siswa, siswa mampu mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Kesadaran politik ini tentu perlu disosialisasikan agar semua mengerti dan paham akan hak dan kewajiban siswa sebagai warga negara sehingga nantinya dapat mencetak warga negara yang baik

Warga negara yang memiliki kesadaran politik yang tinggi, diharapkan juga akan mempunyai partisipasi politik yang tinggi. Partisipasi politik yang aktif dari rakyat diharapkan mampu memberikan perubahan pada kehidupan politik bernegara. Apabila rakyat aktif berpartisipasi di dalam kehidupan kenegaraan, diharapkan setiap kebijakan yang diambil dan dibuat oleh pemerintah ini mampu menampung setiap aspirasi rakyat. Kesesuaian antara aspirasi rakyat dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan mampu

menciptakan kehidupan kenegaraan yang lebih baik dan lebih terfokus demi terwujudnya kebaikan bersama untuk mencapai kemakmuran.

Kesadaran politik merupakan sikap dasar yang dimiliki oleh seseorang tentang pengetahuan politik, kepercayaan politik serta peranan dan kewajibannya sebagai warganegara yang mempunyai perasaan terhadap sistem politik dan mengetahui serta mempercayai peranan para aktor politik yang mana nantinya mampu memberikan keputusan dan pendapatnya tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Kesadaran politik juga merupakan sikap dasar seseorang yang mengacu pada orientasi politik. Orientasi politik yang dimaksud adalah seperti yang dijelaskan oleh Parsons dan Shils membedakan orientasi politik menjadi 3 yaitu: Orientasi Kognitif, yaitu: Pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, Orientasi Afektif, yaitu: Perasaan terhadap system politik, peranannya, para actor dan penampilannya, dan Orientasi Evaluatif, yaitu: Keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan.

Kesadaran politik juga dapat dikatakan sebagai kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.

Ciri-ciri dari kesadaran politik adalah: Mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, Berperan menyangkut pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik, Mempunyai minat dan perhatian sebagai warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran adalah: pendidikan politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik.

Setiap pelaku dianggap mempunyai kesadaran politik apabila telah menyadari dan mengetahui tentang sistem politik baik mengenai aspek politik maupun aspek pemerintahannya. Seorang warga negara secara sadar cenderung berorientasi terutama pada sisi *output* pemerintahan; eksekutif, birokrasi dan yudikatif (Almond & Verba, 1984:55). Almond dan Verba juga menyebutkan bahwa ciri-ciri seseorang dikatakan mempunyai kesadaran politik sebagai berikut: individu yang mempunyai upaya untuk menemukan seberapa banyak kepentingan yang harus ditambahkan pada pemerintahan lokal, mempunyai derajat kesadaran dan keterbukaan terhadap politik

dan urusan-urusan umum, mempunyai pengujian informasi politik yang dimaksudkan untuk memperoleh jumlah perbedaan mengenai penguasaan informasi politik yang dimiliki oleh warga negara, dan mempunyai suatu tingkat kesadaran masyarakat guna melaksanakan pilihan-pilihan atau mengajukan berbagai pendapat tentang isu-isu dan masalah-masalah politik.

Menurut Soekanto (1982) terdapat empat indikator kesadaran yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya dan menunjuk pada tingkat kesadaran tertentu, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, antara lain: Pengetahuan adalah hasil dari proses mengingat suatu materi yang telah dipelajari sebelumnya. Orang dikatakan tahu harus bisa mendefinisikan materi atau objek tersebut, Pemahaman adalah hasil dari kemampuan menjelaskan secara benar tentang objek yang diketahui dan dapat menginterpretasikan materi tersebut dengan benar, sikap adalah kesiapan atau kesiapan untuk bertindak yang terdiri dari menerima, merespon, menghargai dan bertanggung jawab terhadap suatu objek, dan Tindakan adalah sesuatu yang dilakukan atau perbuatan.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran politik antara lain adalah pendidikan politik, sosialisasi politik, dan komunikasi politik: Pendidikan politik pada dasarnya berlangsung secara alamiah dalam suatu masyarakat dan sering dilakukan oleh organisasi politik, keluarga atau individu, dengan adanya pendidikan politik, kesadaran politik akan tumbuh di dalam diri individu, sebab proses sosialisasi politik terjadi di dalam pendidikan politik, Sosialisasi politik ialah proses penyampaian sikap dan orientasi para anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik ini masyarakat mengalami proses pembelajaran dan pengarahan sikap sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Surbakti, 1992:117). Kesadaran politik tentu akan tumbuh di dalam proses sosialisasi politik sebab di dalam proses sosialisasi politik terjadi pengenalan dan pemahaman tentang politik dan hal ini tentu akan memicu tumbuhnya kesadaran politik di dalam diri individu, komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi, pengetahuan, nilai-nilai mengenai politik dan pemerintahannya dan mempunyai makna bahwa komunikasi politik mengantarkan setiap lembaga atau yang berkepentingan untuk menentukan sikap politik dengan berpegangan pada kepentingan atas kebijakan, Surbakti (1992:119) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses penyampaian

informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah.

Kesadaran politik guru PPKn perlu diadakan penelitian untuk mengetahui bagaimana tingkat kesadaran politik yang dimiliki, sebab apabila ditinjau dari fungsi dan tugas guru PPKn yaitu sebagai salah satu agen sosialisasi politik yang memiliki salah satu tugas menanamkan kesadaran politik di dalam diri siswa, maka hal ini perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana tingkat kesadaran politik guru PPKn. Dengan diadakan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana tingkat kesadaran politik guru PPKn dan pengujian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah terjadi kesesuaian antara tugas dan fungsi guru PPKn dengan kesadaran politik di dalam diri guru PPKn.

Fokus pada penelitian ini yakni bagaimana pada tingkat kesadaran politik guru PPKn. Dalam penelitian ini masalah dibatasi pada ranah orientasi politik saja yakni hanya mengukur tingkat kesadaran politik yang diukur dengan tes pada guru PPKn yang hanya tergabung dalam MGMP PPKn SMA di Kabupaten Jombang.

Penelitian ini membahas tentang 3 sub materi yaitu orientasi politik yang menjadi dasar dari kesadaran politik diantaranya ialah: Orientasi Kognitif, yaitu: Pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya. Orientasi Afektif, yaitu: Perasaan terhadap system politik, peranannya, para actor dan penampilannya. Orientasi Evaluatif, yaitu: Keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. (Almond & Verba. 1951: 53).

Kesadaran politik merupakan sikap dasar seseorang yang mengacu pada orientasi politik. Orientasi politik yang dimaksud adalah seperti yang dijelaskan oleh Parsons dan Shils membedakan orientasi politik menjadi 3 yaitu: Orientasi Kognitif, yaitu: Pengetahuan tentang politik dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya, Orientasi Afektif, yaitu: Perasaan terhadap system politik, peranannya, para actor dan penampilannya, Orientasi Evaluatif, yaitu: Keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan kombinasi standar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan. (Almond & Verba. 1951: 53).

Sedangkan Surbakti (1992:144) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kesadaran politik

ialah kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara. Hal ini menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup.

Setiap pelaku dianggap mempunyai kesadaran politik apabila telah menyadari dan mengetahui tentang sistem politik baik mengenai aspek politik maupun aspek pemerintahannya. Seorang warga negara secara sadar cenderung berorientasi terutama pada sisi *output* pemerintahan; eksekutif, birokrasi dan yudikatif (Almond & Verba, 1984:55).

Almond dan Verba juga menyebutkan bahwa ciri-ciri seseorang dikatakan mempunyai kesadaran politik sebagai berikut: Individu yang mempunyai upaya untuk menemukan seberapa banyak kepentingan yang harus ditambahkan pada pemerintahan lokal, Mempunyai derajat kesadaran dan keterbukaan terhadap politik dan urusan-urusan umum, Mempunyai pengujian informasi politik yang dimaksudkan untuk memperoleh jumlah perbedaan mengenai penguasaan informasi politik yang dimiliki oleh warga negara, Mempunyai suatu tingkat kesadaran masyarakat guna melaksanakan pilihan-pilihan atau mengajukan berbagai pendapat tentang isu-isu dan masalah-masalah politik.

Sedangkan berdasarkan pengertian dari kesadaran politik yang dipaparkan oleh Surbakti (1992:144), dapat dijabarkan ciri-ciri dari kesadaran politik sebagai berikut: Mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, Berperan menyangkut pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik, Mempunyai minat dan perhatian sebagai warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik.

Penelitian ini menggunakan pendapat dari Almond dan Verba yang menyatakan kesadaran politik seseorang dapat diukur melalui orientasi politik. Orientasi politik tersebut dibagi menjadi tiga yaitu Orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif.

Orientasi Kognitif merupakan indikator dari mengerti akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yaitu hak dan kewajiban yang harus dimengerti adalah, jika mempunyai hak atas kebebasan, maka akan mempunyai kewajiban untuk menghormati kebebasan orang lain. Jika warga Negara mempunyai hak untuk berpartisipasi dan berinteraksi dalam proses politik, maka ia akan mempunyai kewajiban berpartisipasi dan berusaha agar pemimpin-pemimpin yang terbaiklah yang akan terpilih (Budiardjo,2008:230).

Orientasi Afektif merupakan indikator dari Berperan menyangkut pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik yaitu ikut berperan serta yang menyangkut pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik berarti mendapatkan informasi yang menjadi pengetahuan, serta memberikan penilaian sebagai seorang warga negara terhadap suatu bentuk kinerja pemerintah (sistem politik) dalam pembuatan keputusan dan kebijakan umum. Penilaian suatu bentuk kinerja pemerintah (sistem politik) adalah penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak (Surbakti, 1992:144).

Orientasi Evaluatif merupakan indikator dari mempunyai minat dan perhatian sebagai warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik yaitu Minat dan perhatian warga negara merupakan serangkaian kegiatan yang diperlukan untuk kepentingan bersama dalam berbangsa dan bernegara. Sanit (2012:108) mengatakan bahwa keikutsertaan masyarakat luas bukan hanya dalam mengawasi kinerja aparat pemerintahan seperti birokrasi pemerintahan, jika berbicara mengenai pembangunan negara dibutuhkan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai sistem. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat dan perhatian terhadap masyarakat dan politik tidak hanya sebagai pengamat politik saja. Partisipasi aktif untuk membuat keputusan bersama, cakap untuk melakukan interaksi politik, mempunyai perhatian terhadap pembangunan negara, mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum seperti mengajukan tuntutan, membayar pajak, mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan suatu kebijakan umum, mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif. Pendekatan penelitian deskriptif kuantitatif menurut peneliti sangat cocok untuk digunakan dalam penelitian ini, karena berusaha untuk mendeskripsikan tingkat kesadaran politik guru PPKn di Kabupaten Jombang. Melalui metode yang digunakan ini diharapkan peneliti mampu mengangkat fakta, keadaan dan fenomena yang terjadi, memaparkan masalah dengan menyeluruh, mendalam dan jelas, serta menyajikan data dengan benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yakni adalah

di SMAN 3 Jombang, yaitu tempat dimana kegiatan MGMP PPKn dilakukan. Waktu penelitian yakni mulai dari tahap pengajuan judul skripsi sampai pada penyusunan hasil penelitian lapangan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling. Dalam Sugiyono (2011 : 82) dikatakan simple (sederhana) karena pengambilan anggota sample dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Pengambilan sampel tidak membedakan jenis kelamin dengan demikian peneliti memberikan hak yang sama kepada setiap subyek untuk memperoleh kesempatan dipilih menjadi sampel. Dengan demikian sampel penelitian sebanyak 29 responden yaitu seluruh anggota MGMP PPKn di Kabupaten Jombang.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket yang berupa skala sikap, yakni dimana dalam angket tersebut terdapat beberapa item pernyataan yang jawabannya adalah *option* pilihan skala sikap yang nantinya diharapkan responden bisa leluasa memilih jawaban yang dianggap tepat terkait dengan pernyataan. Skala sikap dibuat dengan tujuan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan tingkat kesadaran politik guru PPKn di Kabupaten Jombang. Setelah angket disebar, peneliti juga menggunakan wawancara yang dilakukan kepada beberapa guru PPKn secara acak terkait kesadaran politik dengan tujuan sebagai bahan penguat data dari hasil penelitian. Instrument yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 20 soal.

Teknik analisis data Analisis data merupakan langkah yang digunakan untuk menggeneralisasikan atau menarik kesimpulan. Data dari penelitian harus dianalisis agar teruji kebenarannya. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dalam bentuk presentase. Analisis data dilakukan dengan mempresentasikan angka dan kemudian dideskripsikan, karena tidak mungkin pembaca dapat memahami isi penelitian tanpa adanya analisis data. Rumus presentase yakni:

$$P = \frac{n}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Hasil akhir dalam presentase

n = Nilai yang diperoleh dari hasil angket

N = Jumlah responden.

Untuk menentukan skor jawaban pada angket maka ditentukan:

Setiap jawaban yang memilih jawaban selalu mendapatkan skor = 4

Setiap jawaban yang memilih jawaban sering mendapatkan skor = 3

Setiap jawaban yang memilih jawaban kadang-kadang mendapatkan skor = 2

Setiap jawaban yang memilih jawaban tidak pernah mendapatkan skor = 1

Setelah menentukan skor jawaban dari angket maka diperlukan penentuan kriteria penilaian. Adapun kriteria hasil penilaian adalah sebagai berikut:

Kurang dari 37% = Sangat Rendah

37% – 52% = Rendah

53% – 68% = Sedang

69% – 84% = Tinggi

85% – 100% = Sangat Tinggi

Kemudian hasil perhitungan dan prosentase akan dijelaskan secara deskriptif. Hasil wawancara juga akan dipaparkan sebagai penguat dari hasil perhitungan dan analisis data yang diperoleh. Dengan demikian akan diperoleh kebenaran data yang dapat menggambarkan tingkat kesadaran politik guru PPKn di Kabupaten Jombang.

## HASIL PENELITIAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan tingkat kesadaran politik guru PPKn di Kabupaten Jombang, maka data yang telah terkumpul diolah dengan menggunakan rumus prosentase dan digolongkan pada kriteria sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Jika responden mendapatkan hasil prosentase Kurang dari 37% maka digolongkan pada kriteria sangat rendah, hasil prosentase 37%–52% digolongkan pada kriteria rendah, hasil prosentase 53%–68% digolongkan pada kriteria sedang, hasil prosentase 69%–84% digolongkan pada kriteria tinggi, dan hasil prosentase 85%–100% digolongkan pada kriteria sangat tinggi. Berikut hasil perhitungan menggunakan prosentase pada tabel 1.

Tabel 1. Tentang Tingkat Kesadaran Politik Guru PPKn

Kriteria	Jumlah responden menjawab berdasarkan kriteria	Prosentase
Sangat Rendah	-	Kurang dari 37%
Rendah	-	37%–52%
Sedang	1	53%–68%
Tinggi	17	69%–84%
Sangat Tinggi	11	85%-100%

Sumber : Olah data dari peneliti.

Berdasarkan tabel 1, dapat dilihat bahwa terdapat 11 orang yang tergolong ke dalam kriteria sangat tinggi yakni mendapat skor antara 85%-100%, terdapat 17 orang guru yang tergolong ke dalam kriteria tinggi yakni mendapat skor antara 69%-84%, terdapat 1 orang guru yang tergolong ke dalam kriteria sedang yakni mendapat skor 53%-68%, dan 0 orang guru yang tergolong ke dalam kriteria rendah yakni mendapat skor 37%-52%, serta 0 orang guru yang tergolong ke dalam kriteria sangat rendah yakni mendapat skor kurang dari 37%.

Hasil dari analisis tersebut, jumlah guru PPKn paling banyak berada pada kriteria tinggi yakni sebanyak 17 guru dengan mendapatkan hasil prosentase antara 69%-84%. Jadi dapat disimpulkan bahwa Guru PPKn di Kabupaten Jombang dapat dikatakan memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi, karena terdapat mayoritas jumlah guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi.

Terdapat 11 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang sangat tinggi, 17 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi, dan 1 orang guru memiliki tingkat kesadaran yang sedang. Dari data tersebut akan diuraikan lagi bagaimana tingkat kesadaran politik mereka apabila ditinjau dari orientasi politik. 11 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang sangat tinggi tersebut akan diuraikan lagi kesadaran politik mereka apabila ditinjau dari orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. 17 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi akan diuraikan lagi kesadaran politik mereka apabila ditinjau dari orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif, dan 1 orang guru

yang memiliki tingkat kesadaran politik yang sedang akan diuraikan lagi kesadaran politiknya apabila ditinjau dari orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif..

Adapun hasil perhitungan prosentase tingkat kesadaran politik guru PPKn di kabupaten jombang berdasarkan orientasi politik adalah sebagai berikut pada tabel 2.

Tabel 2. Tentang Hasil Perhitungan Persentase Tingkat Kesadaran Politik Guru PPKn di Kabupaten Jombang

No	Kesadaran Politik Ditinjau Dari Orientasi Politik	Persentase
1.	Kesadaran Politik berdasar Orientasi Kognitif	91,43% (Sangat Tinggi)
2.	Kesadaran Politik berdasar Orientasi Afektif	85,43% (Sangat Tinggi)
3.	Kesadaran Politik berdasar Orientasi Evaluatif	66,33% (Sedang)

Sumber : Olah data dari peneliti.

Berdasarkan tabel 2, dapat menunjukkan bahwa hasil persentase untuk orientasi politik ranah kognitif menunjukkan angka 91,43% dengan kriteria sangat tinggi artinya bahwa guru PPKn mempunyai orientasi politik ranah kognitif yang sangat tinggi untuk menunjang tingkat kesadaran politik yang ia miliki. Hasil persentase untuk orientasi politik ranah afektif menunjukkan angka 85,43% juga dengan kriteria sangat tinggi, artinya bahwa guru PPKn mempunyai orientasi politik ranah afektif yang tinggi untuk menunjang tingkat kesadaran politik yang ia miliki. Hasil persentase untuk orientasi politik ranah evaluatif menunjukkan angka 66,33% dengan kriteria sedang, artinya bahwa guru PPKn mempunyai orientasi politik ranah evaluatif yang sedang untuk menunjang tingkat kesadaran politik yang ia miliki.

Berdasarkan tabel 2 terdapat 11 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang sangat tinggi, 17 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi, dan 1 orang guru memiliki tingkat kesadaran yang sedang. Dari data tersebut akan diuraikan lagi bagaimana tingkat



kesadaran politik mereka apabila ditinjau dari orientasi politik. 11 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang sangat tinggi tersebut akan diuraikan lagi kesadaran politik mereka apabila ditinjau dari orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. 17 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi akan diuraikan lagi kesadaran politik mereka apabila ditinjau dari orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif, dan 1 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang sedang akan diuraikan lagi kesadaran politiknya apabila ditinjau dari orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif. Hal ini akan dipaparkan di dalam tabel berikut:

Tabel. 3. Prosentase Orientasi Politik Ditinjau Dari Tingkat Kesadaran Politik Guru PPKn Di Kabupaten Jombang

No	Kategori Guru	Juml Guru	Prosent Orientasi Kognitif	Prosent Orientasi Afektif	Prosent Orientasi Evaluatif
1	Tingkat Kesadaran Politik Sangat Tinggi	11 orang	93% (Sangat Tinggi)	89% (Sangat Tinggi)	81% (Tinggi)
2	Tingkat Kesadaran Politik Tinggi	17 orang	92% (Sangat Tinggi)	84% (Tinggi)	59% (Sedang)
3	Tingkat Kesadaran Politik Sedang	1 orang	82% (Tinggi)	71% (Tinggi)	39% (Rendah)

Sumber : Olah data dari peneliti

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa 11 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang sangat tinggi tersebut mempunyai tingkat orientasi kognitif sangat tinggi dengan prosentase 93%, dan mempunyai orientasi afektif sangat tinggi dengan prosentase 89%, serta mempunyai orientasi evaluatif yang tinggi dengan prosentase 81%. 17 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi tersebut mempunyai tingkat orientasi kognitif sangat tinggi dengan prosentase 92%, dan mempunyai orientasi afektif yang tinggi dengan prosentase 89%, serta mempunyai orientasi evaluatif yang sedang dengan prosentase 59%. 1 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang sedang tersebut mempunyai tingkat orientasi kognitif yang tinggi dengan prosentase 82%, dan mempunyai orientasi afektif yang tinggi dengan prosentase 71%,

serta mempunyai orientasi evaluatif yang rendah dengan prosentase 39%.

## PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang telah dipaparkan pada tabel 1, menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik guru PPKn di Kabupaten Jombang adalah tinggi. Jika Guru PPKn sebagai salah satu agen sosialisasi politik merupakan salah satu dari faktor pendorong adanya kesadaran politik dalam aspek pendidikan politik. Guru PPKn di dalam mengajarkan mata pelajaran PPKn secara tidak langsung adalah melakukan sosialisasi politik terhadap siswa melalui mata pelajaran PPKn. Menurut Alfian, pendidikan politik merupakan usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat agar mereka memahami nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal sehingga dapat melahirkan sikap dan tingkah laku politik yang ideal.

Berdasarkan pendapat dari Alfian, Guru PPKn berperan penting dalam pendidikan politik sebagai salah satu agen sosialisasi politik yang bertugas untuk menanamkan kesadaran politik di dalam diri siswa yang nantinya akan membentuk sikap politik di dalam diri siswa. Melalui penanaman kesadaran politik ini, siswa diharapkan dapat *melek* politik.

Guru PPKn mempunyai tingkat kesadaran politik yang tinggi dapat disebabkan oleh faktor kesadaran politik yaitu pendidikan politik. Pendidikan politik yang diperoleh guru PPKn adalah melalui kuliahnya saat penempuh di perguruan tinggi pada jurusan PPKn. Di dalam perkuliahan PPKn, guru PPKn tentu mendapatkan pendidikan politik yang baik karena dalam perkuliahan PPKn, mayoritas peerkuliannya adalah mengandung pendidikan politik. Pendidikan politik tersebut dilakukan agar para mahasiswanya *melek* politik dan akhirnya mempunyai kesadaran politik.

Selain melalui perkuliahan PPKn, guru PPKn tentu mendapatkan pendidikan politik melalui kegiatan sosialisasi yang diperoleh dari kegiatan seminar yang telah mereka ikuti. Kegiatan sosialisasi politik merupakan bagian dari pendidikan politik. Sosialisasi politik merupakan proses penyampaian sikap dan orientasi para anggota masyarakat. Melalui sosialisasi politik ini masyarakat mengalami proses pembelajaran dan pengarahan sikap sebagai warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran politik tentu akan tumbuh di dalam proses sosialisasi politik sebab di dalam proses sosialisasi politik terjadi pengenalan dan pemahaman tentang

politik dan hal ini tentu akan memicu tumbuhnya kesadaran politik di dalam diri individu.

Setelah mendapatkan sosialisasi politik tentu ini sama halnya mendapatkan pendidikan politik. Dengan adanya sosialisasi politik, pengetahuan politik seseorang tentu akan bertambah. Setelah mendapatkan pengetahuan politik pastilah akan menimbulkan sikap politik yang ditimbulkan oleh pengetahuan politik yang dimiliki. Setelah memiliki pengetahuan politik dan sikap politik tentu akan menimbulkan orientasi politik dan penilaian politik. Penilaian politik ini biasanya dilakukan dengan cara menganalisis tentang kejadian politik yang terjadi saat ini, sehingga dapat menilai dan menyimpulkan bagaimana kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah dan sebagai warga negara harus berbuat apa dan bagaimana terhadap kebijakan tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan angket, dapat disimpulkan bahwa guru PPKn di Kabupaten Jombang mempunyai tingkat kesadaran politik yang tinggi. Hal ini disesuaikan dengan rata-rata penghitungan keseluruhan angket yang memperoleh prosentase penilaian 82%. Apabila dimasukkan dalam kategori nilai prosentase penilaian angka 82% termasuk dalam kategori tingkat kesadaran politik yang dimiliki oleh guru PPKn di kabupaten Jombang adalah dalam kategori tingkat kesadaran politik yang tinggi.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa terdapat 11 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang sangat tinggi dengan kriteria penilaian antara 85%-100%, terdapat 17 orang guru memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi dengan kriteria penilaian 69%-84%, dan terdapat 1 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang sedang dengan kriteria penilaian 53%-68%.

Berdasarkan pengolahan data tersebut dapat terlihat bahwa guru PPKn di Kabupaten jombang tidak seluruhnya mempunyai tingkat kesadaran politik yang tinggi tetapi terdapat 11 orang guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang sangat tinggi, dan guru yang mempunyai tingkat kesadaran politik yang tinggi adalah 17 orang guru, sedangkan yang mempunyai tingkat kesadaran politik yang sedang adalah 1 orang guru. Berdasarkan data tersebut, 17 orang guru ini menjadi mayoritas guru yang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi sehingga kesimpulan dari rata-rata tingkat kesadaran politik guru PPKn di Kabupaten Jombang adalah tingkat kesadaran politik yang tinggi.

Kesadaran politik yang dimiliki oleh guru PPKn di Kabupaten Jombang ini dikategorikan ke dalam 3 hal yaitu Orientasi Kognitif, Orientasi Afektif, dan Orientasi Evaluatif. Dalam kehidupan sehari-hari guru PPKn di Kabupaten Jombang ini dinilai mempunyai kesadaran politik yang tinggi dan dapat dikatakan sesuai dengan tugas mereka dalam menanamkan kesadaran politik di dalam diri siswa melalui mata pelajaran PPKn.

Kesadaran politik yang mencakup orientasi kognitif adalah pengetahuan politik dimana WNI yang mengerti akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Di dalam hasil penghitungan hasil angket sesuai dengan kelompok kategori item pertanyaan angket yang mengacu pada kesadaran politik yang mencakup orientasi kognitif yaitu memperoleh prosentase sebanyak 91,43%. Hasil prosentase ini berdasarkan kategori penilaian termasuk dalam kriteria kesadaran politik yang sangat tinggi.

Hasil prosentase penilaian orientasi kognitif yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa orientasi politik ranah kognitif yang dimiliki oleh guru PPKn adalah menandakan bahwa guru PPKn di kabupaten Jombang sangat menguasai orientasi kognitif. Orientasi kognitif ini meliputi tentang pengetahuan politik yang dimiliki oleh warga negara. Pengetahuan politik ini menyangkut tentang pemahaman akan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Di dalam pengetahuan politik yang menyangkut tentang pengertian tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara memiliki prosentase penilaian 91,43%, dan apabila disesuaikan dengan prosentase penilaian termasuk dalam kategori kesadaran politik yang sangat tinggi.

Hasil prosentase penilaian orientasi kognitif yang sangat tinggi ini juga menunjukkan bahwa guru PPKn di kabupaten Jombang sangat memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mereka menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dengan sangat baik. Sehingga dapat dikategorikan dalam prosentase penilaian kesadaran politik yang sangat tinggi dalam orientasi politik ranah kognitif.

Kesadaran politik yang mencakup orientasi afektif adalah sikap terhadap sistem politik dimana WNI mempunyai peranan menyangkut pengetahuan dalam lingkungan masyarakat dan politik. Di dalam hasil penghitungan hasil angket sesuai dengan kelompok kategori item pertanyaan angket yang mengacu pada kesadaran politik yang mencakup orientasi afektif yaitu memperoleh prosentase

sebanyak 85,43%. Hasil prosentase ini berdasarkan kategori penilaian termasuk dalam kriteria kesadaran politik yang sangat tinggi.

Hasil prosentase penilaian orientasi afektif yang tinggi ini menunjukkan bahwa orientasi politik ranah afektif yang dimiliki oleh guru PPKn adalah menandakan bahwa guru PPKn di kabupaten Jombang sangat menguasai orientasi afektif. Orientasi afektif ini menyangkut tentang sikap politik yang dimiliki oleh warga negara. Sikap politik ini menyangkut tentang perasaan terhadap suatu sistem politik yang nantinya akan membentuk sebuah keyakinan yang ada di dalam diri warga negara dan diwujudkan dalam perilaku politik dan sikap politik.

Hasil prosentase penilaian orientasi afektif yang sangat tinggi ini juga menunjukkan bahwa guru PPKn di kabupaten Jombang mempunyai sikap politik dan perilaku yang ditimbulkan oleh perasaan kepercayaan politiknya adalah dalam kategori baik. Berdasarkan hasil angket dalam kategori penilaian orientasi afektif ini menunjukkan bahwa guru PPKn di kabupaten Jombang mempunyai perasaan kepercayaan pada sistem politik yang sangat tinggi. Mereka mempunyai sikap politik yang sangat baik atas kepercayaan politik yang timbul di dalam dirinya setelah mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Sehingga dapat dikategorikan dalam prosentase penilaian kesadaran politik yang sangat tinggi dalam orientasi politik ranah afektif.

Kesadaran politik yang mencakup orientasi evaluatif adalah penilaian terhadap sistem politik dimana WNI mempunyai minat dan perhatian sebagai warga negara terhadap lingkungan masyarakat dan politik. Di dalam hasil penghitungan hasil angket sesuai dengan kelompok kategori item pertanyaan angket yang mengacu pada kesadaran politik yang mencakup orientasi evaluatif yaitu memperoleh prosentase sebanyak 66,33%. Hasil prosentase ini berdasarkan kategori penilaian termasuk dalam kesadaran politik kriteria sedang.

Hasil prosentase penilaian orientasi evaluatif termasuk dalam kesadaran politik kriteria sedang ini menunjukkan bahwa orientasi politik ranah evaluatif yang dimiliki oleh guru PPKn adalah menandakan bahwa guru PPKn di kabupaten Jombang berada di dalam posisi tengah-tengah antara kesadaran politik yang sangat tinggi dan kesadaran politik yang sangat rendah.

Kesimpulan yang dapat diperoleh bahwa guru PPKn di kabupaten Jombang ini mempunyai tingkat

kesadaran politik dalam ranah orientasi kognitif yang sangat tinggi dengan prosentase 91,43%. Orientasi kognitif yang berupa pengetahuan politik yang sangat tinggi ini kemudian menimbulkan perasaan terhadap sistem politik yang kemudian melahirkan kepercayaan terhadap sistem politik dimana hal itu melahirkan sebuah sikap politik yang dimiliki oleh warga negara. sikap politik inilah yang disebut sebagai orientasi afektif. Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran politik dalam ranah orientasi afektif ini mempunyai kategori penilaian kesadaran politik yang sangat tinggi dengan prosentase 85,43%.

Orientasi afektif yang berupa sikap dan perilaku politik yang dalam kategori kesadaran politik yang ini, akhirnya memunculkan sikap penilaian terhadap sistem politik yang berlaku di sebuah negara. Penilaian sistem politik ini dapat ditinjau dari penilaian tentang sebuah kebijakan publik yang dilakukan guru PPKn di kabupaten Jombang. Penilaian politik ini merupakan wujud dan aplikasi dari sikap dan perilaku politik yang dimiliki oleh guru PPKn di kabupaten Jombang. Penilaian politik inilah yang disebut dengan orientasi evaluatif. Berdasarkan hasil penelitian, kesadaran politik dalam ranah orientasi evaluatif ini mempunyai kategori penilaian kesadaran politik kriteria sedang dengan prosentase 66,33%.

Berdasarkan perbedaan hasil rata-rata prosentase dari tingkat kesadaran politik yang digolongkan berdasarkan indikator dari masing-masing indikator dari kesadaran politik yang mencakup tentang orientasi kognitif, orientasi afektif, dan orientasi evaluatif ini menunjukkan hasil yang menurun. Artinya bahwa guru PPKn di kabupaten Jombang memiliki tingkat kesadaran politik dalam ranah orientasi kognitif yang sangat tinggi dengan prosentase penilaian 91,43%. Dan kesadaran politik dalam ranah orientasi afektif yang sangat tinggi dengan prosentase penilaian 85,43%. Sedangkan tingkat kesadaran politik dalam ranah orientasi evaluatif adalah termasuk dalam kategori tingkat kesadaran politik kriteria sedang dengan prosentase penilaian 66,33%.

Dari perbedaan dan penurunan hasil prosentase rata-rata penilaian dari indikator kesadaran politik yang dimiliki oleh guru PPKn di kabupaten Jombang ini dapat disimpulkan bahwa apabila diukur dalam hal pengetahuan politik menunjukkan hasil yang sangat tinggi, mereka sangat mengerti dan paham atas hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, dan apabila diukur dalam hal sikap dan perilaku politik juga menunjukkan hasil yang sangat

tinggi, mereka mempunyai sikap dan perilaku politik yang sangat tinggi. Sedangkan apabila diukur dalam hal penilaian politik yang terkait dengan penilaian terhadap kebijakan politik menunjukkan hasil dalam kriteria penilaian yang sedang.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terlihat sangat jelas bahwa terjadi penurunan hasil dari tingkat kesadaran politik yang digolongkan dalam indikator kesadaran politik. Pada tingkat kesadaran politik dalam ranah orientasi kognitif menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik yang dimiliki oleh guru PPKn di kabupaten Jombang adalah sangat tinggi dengan prosentase 91,43% dan juga pada tingkat kesadaran politik dalam ranah orientasi afektif menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik yang dimiliki oleh guru PPKn di Kabupaten Jombang adalah sangat tinggi dengan prosentase 85,43%. Sedangkan pada akhirnya tingkat kesadaran politik dalam ranah evaluatif menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik dalam kriteria sedang dengan prosentase 66,33%.

Perbedaan hasil prosentase hasil penilaian tingkat kesadaran politik berdasar indikator kesadaran politik ini terjadi karena kesadaran politik dalam ranah orientasi kognitif ini menunjukkan hasil prosentase yang sangat tinggi karena orientasi kognitif ini merupakan tingkatan yang paling awal dan mudah, yaitu tentang pengetahuan politik yang dimiliki oleh guru PPKn di Kabupaten Jombang. Pengetahuan politik ini menyangkut tentang pemahaman tentang hak dan kewajiban yang dimiliki oleh warga negara. Guru PPKn pastilah mengerti dan memahami tentang hak dan kewajibannya sebagai warga negara, karena tidak dapat diragukan lagi tentang pengetahuan politik yang guru PPKn miliki. Hal ini didukung oleh pernyataan dari M. Zainul Abidin yaitu pengetahuan politik pastilah sangat dimiliki oleh semua guru PPKn, karena memang dibekali dengan pengetahuan politik dengan sangat baik saat di perguruan tinggi. Pengetahuan politik ini memang hal yang paling mudah karena memang sudah punya bekal akan hal itu, dan sesuai dengan menjalani hak dan kewajiban.

Berdasarkan dari pernyataan dari M. Zainul Abidin ini, dapat memperkuat hasil penelitian bahwa guru PPKn di kabupaten Jombang memang mempunyai pengetahuan politik yang sangat tinggi. Pengetahuan politik ini didapatkan saat menempuh pendidikan di perguruan tinggi dan pengetahuan politik ini memang sengaja dibekalkan kepada guru PPKn sebagai penunjang ilmu pengetahuan yang mereka miliki. M. Zainul Abidin ini juga mengakui

bahwa tingkatan orientasi politik ranah orientasi kognitif ini merupakan tingkatan awal dan mendasar yang mereka miliki sejak pembekalan jadi guru PPKn

Kesadaran politik dalam ranah afektif menunjukkan hasil prosentase yang sangat tinggi karena orientasi afektif ini merupakan tingkatan kedua sesudah orientasi kognitif. Orientasi kognitif yang berupa pengetahuan politik ini memberikan perasaan kepercayaan terhadap sistem politik dimana akan membentuk sikap dan perilaku politik yang dimiliki oleh guru PPKn di Kabupaten Jombang. Sikap dan perilaku politik yang dimiliki oleh guru PPKn tentu terbentuk dari pengetahuan politik yang mereka miliki. Hal ini didukung oleh pernyataan dari Suprpto yaitu Berdasarkan pendapat dari Suprpto tersebut dapat memperkuat hasil penelitian ini dimana memang orientasi afektif yang mengarah pada sikap politik seseorang adalah termasuk dalam kategori kesadaran politik yang tinggi karena sikap politik dipengaruhi oleh dua hal yaitu pengetahuan politik yang mereka miliki dan keadaan politik yang terjadi saat ini. Sikap politik yang mereka ambil ini cenderung pada perasaan dan kepercayaan sistem politik mereka. Guru PPKn memang mempunyai pengetahuan politik yang tinggi tetapi dalam pengambilan sikap politik mereka terjadi pertimbangan antara pengetahuan politik dan perasaan mereka terhadap kondisi politik saat ini.

Kesadaran politik dalam ranah evaluatif ini menunjukkan prosentase penilaian dalam kategori sedang karena orientasi evaluatif ini merupakan wujud dan aplikasi dari pengetahuan politik dan sikap politik yang dimiliki oleh seseorang. Guru PPKn memang mempunyai pengetahuan politik yang sangat tinggi, mereka juga mempunyai sikap dan perilaku politik yang tinggi, tetapi dalam hal aplikasi dari pengetahuan dan sikap politik yang mereka miliki termasuk memiliki tingkat kesadaran politik dalam ranah orientasi evaluatif dalam kategori sedang. Hal ini juga didukung oleh pendapat Puji Rawati yaitu kesadaran politik guru PPKn dalam hal penilaian politik ini termasuk dalam kriteria sedang dan terjadi penurunan dari orientasi kognitif ke orientasi afektif dan orientasi evaluatif, karena memang guru PPKn di Kabupaten Jombang jarang memberikan penilaian politik yang dikarenakan oleh kurangnya perasaan percaya terhadap sistem politik yang berlaku saat ini.

Dari hasil penelitian tingkat kesadaran politik guru PPKn di Kabupaten Jombang yang telah dapat diambil rata-rata keseluruhan dari masing-masing

indikator kesadaran politik. Tingkat kesadaran politik yang dimiliki oleh guru PPKn di Kabupaten Jombang adalah tingkat kesadaran politik yang tinggi dengan prosentase 82%. Jadi rata-rata keseluruhan tingkat kesadaran politik guru PPKn di Kabupaten Jombang adalah mempunyai tingkat kesadaran politik yang tinggi.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat kesadaran politik yang dimiliki oleh guru PPKn di Kabupaten Jombang adalah tinggi. Maka hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa profesi guru PPKn memberikan kontribusi terhadap kesadaran politik yang dimiliki oleh Guru PPKn. Guru PPKn memang sepatasnya memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi karena hal ini sesuai dengan peranan dan tugas yang dimiliki oleh guru PPKn yaitu memberikan pendidikan politik kepada siswa melalui mata pelajaran PPKn sehingga dapat menanamkan kesadaran politik di dalam diri siswa.

Selain mengajarkan mata pelajaran PPKn, guru PPKn merupakan salah satu ujung tombak dalam membangun dan meningkatkan kesadaran politik siswa. Guru PPKn memiliki tanggung jawab membangun dan meningkatkan kesadaran politik siswa dengan salah satu cara yaitu mensosialisasikan cara menjadi warga negara yang baik, yaitu warga negara yang mengerti akan hak dan kewajiban. Melalui mata pelajaran PPKn yang disampaikan, sosialisasi politik ini disampaikan oleh guru PPKn. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk membangun pondasi kepada siswa dalam menciptakan bangsa yang berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berguna bagi nusa dan bangsa.

Tugas pokok guru PPKn adalah mengajar dan menyampaikan materi PPKn kepada siswa, materi PPKn yang disampaikan berisi tentang orientasi bagaimana menjadi warga negara yang baik. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas pokok guru PPKn adalah mencetak para siswa dimana kelak dapat menjadi warga negara yang baik dengan cara mengaplikasikan apa yang telah disampaikan guru PPKn melalui mata PPKn di dalam proses pembelajaran di kelas.

Guru PPKn juga dapat disebut sebagai ujung tombak suksesnya pendidikan politik di dalam sekolah, sebab guru PPKn yang berperan sangat dominan dalam proses pendidikan politik melalui mata pelajaran PPKn yang diajarkan kepada siswa. Siswa wajib mendapatkan pelajaran PPKn di dalam kelas. Melalui PPKn siswa dapat mendapatkan pelajaran yang mampu memberikan pengetahuan

politik dan menciptakan kesadaran politik yang ada pada diri mereka.

Oleh karena itu guru PPKn harus mempunyai tingkat kesadaran politik yang tinggi sebab sebab apabila ditinjau dari fungsi dan tugas guru PPKn yaitu sebagai salah satu agen sosialisasi politik yang memiliki salah satu tugas menanamkan kesadaran politik di dalam diri siswa, maka hal ini perlu dilakukan penelitian tentang bagaimana tingkat kesadaran politik guru PPKn. Dengan diadakan penelitian ini, diharapkan mampu memberikan gambaran tentang bagaimana tingkat kesadaran politik guru PPKn dan pengujian ini dilakukan untuk mencari tahu apakah terjadi kesesuaian antara tugas dan fungsi guru PPKn dengan kesadaran politik di dalam diri guru PPKn.

Dengan adanya guru PPKn yang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi, diharapkan dapat mempermudah guru PPKn dalam melakukan sosialisasi politik dan pendidikan politik serta penanaman kesadaran politik pada siswa. Guru PPKn merupakan suri tauladan yang digugu dan ditiru. Murid akan dengan sendirinya meniru dan melakukan imitasi dengan apa yang dilakukan gurunya. Apabila guru memberikan contoh tentang bagaimana seseorang yang mempunyai pengetahuan politik dan memberikan sikap politik serta penilaian politik yang diberikan terhadap kebijakan politik yang terjadi saat ini.

Hal ini dapat diperkuat dengan apa yang disampaikan oleh M. Zainul Abidin yaitu bahwa kesadaran politik yang dimiliki oleh seseorang salah satunya dipengaruhi oleh profesi yang dimiliki seseorang. Secara tidak langsung profesi yang mereka miliki harus mencerminkan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki. Profesi sebagai guru PPKn selain mengajarkan materi PPKn sebenarnya juga merupakan proses pendidikan politik. Dalam proses pendidikan politik, guru PPKn bertugas menanamkan kesadaran politik kepada siswa. Dari tugas menanamkan kesadaran politik kepada siswa ini, guru PPKn merasa malu apabila pada kenyataannya tingkat kesadaran politik mereka itu rendah. Oleh karena itulah mereka meningkatkan kesadaran politik yang mereka miliki.

Profesi guru PPKn merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi terhadap kesadaran politik yang dimiliki oleh guru PPKn ini juga disampaikan oleh Suprpto yaitu guru PPKn mempunyai tanggung jawab moral bahwa profesi sebagai guru PPKn haruslah mencerminkan dan sesuai dengan apa yang diajarkan kepada siswa.

Apabila salah satu tugas guru PPKn adalah menanamkan kesadaran politik di dalam diri siswa, maka tentunya mereka juga harus menanamkan kesadaran politik kepada diri sendiri terlebih dahulu. Jadi apa yang guru PPKn ajarkan kepada murid sesuai dengan kepribadian dari guru PPKn.

Hal serupa juga disampaikan oleh Elok Tri Kusuma Wardani yang berpendapat bahwa profesi sebagai guru PPKn adalah mempunyai tugas yang salah satunya adalah menanamkan kesadaran politik di dalam diri siswa. Sebelum berhasil menanamkan kesadaran politik di dalam diri siswa, tentu guru PPKn harus menanamkan dan mempunyai kesadaran politik yang tinggi di dalam diri pribadi. Memang benar profesi guru PPKn secara tidak langsung mewajibkan untuk mempunyai kesadaran politik yang tinggi, sebab guru PPKn tentu sangat malu apabila sebagai guru PPKn tetapi mempunyai kesadaran politik yang sangat rendah karena itu artinya apabila guru PPKn mempunyai kesadaran politik yang rendah, saya belum bisa dikatakan sebagai WNI yang baik, sedangkan tugas guru PPKn di sekolah selain mengajarkan mata pelajaran PPKn di kelas, guru PPKn juga mempunyai tanggung jawab moral dalam mencetak siswa menjadi WNI yang baik. Lalu apa kata dunia apabila guru PPKn dinilai orang mempunyai kesadaran politik yang rendah sedangkan tugas mereka adalah menanamkan kesadaran politik di dalam diri siswa. Lalu bagaimana pula guru PPKn dapat menanamkan kesadaran politik kepada siswa apabila kesadaran politik guru PPKn saja rendah.

Menurut wawancara dengan Puji Rawati, sebagai guru PPKn mempunyai kewajiban untuk mengikuti pendidikan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran politik yang dimiliki. Forum diskusi untuk mengkritisi kegiatan politik yang terjadi saat ini perlu dilakukan untuk mendorong kesadaran politik yang dimiliki. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran politik yang dimiliki oleh guru PPKn agar sesuai dengan peranannya untuk menanamkan kesadaran politik yang dimiliki. sebagai guru PPKn menyadari bahwa harus meningkatkan kesadaran politik yang ada di dalam diri pribadi, dalam upaya meningkatkan kesadaran politik yang guru PPKn miliki ini biasanya memberikan motivasi kepada diri guru PPKn sendiri bahwa sebagai Guru PPKn haruslah mempunyai kesadaran politik yang tinggi, oleh karena itu lah diwajibkan untuk mengikuti pendidikan politik maupun sosialisasi politik yang ada. Biasanya guru PPKn juga mempunyai forum

diskusi untuk mengkritisi tentang kegiatan-kegiatan politik yang ada saat ini.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa guru PPKn di kabupaten Jombang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi. Berdasarkan pengelompokan guru berdasarkan tingkat kesadaran politik mereka, terdapat 17 orang guru yang mempunyai tingkat kesadaran politik. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata guru PPKn di Kabupaten Jombang memiliki tingkat kesadaran politik yang tinggi.

Profesi sebagai guru PPKn memberikan kontribusi terhadap kesadaran politik yang mereka miliki karena mereka merasa mempunyai tanggung jawab untuk menanamkan kesadaran politik kepada diri siswa. Jadi tentu guru PPKn juga harus mempunyai kesadaran politik yang tinggi agar tercermin sesuai dengan tugasnya yaitu menanamkan kesadaran politik siswa.

### **Saran**

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran politik guru PPKn di Kabupaten Jombang berada pada kriteria tinggi. Dari berbagai situasi dan kondisi yang telah ditemukan di dalam pelaksanaan penelitian, maka saran dan masukan adalah guru PPKn harus terus meningkatkan kesadaran politik yang mereka miliki agar dengan mudah menanamkan kesadaran politik di dalam diri siswa. Guru PPKn juga harus memberikan suri tauladan yang baik bagi siswanya bagaimana menjadi WNI yang baik.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfian. 1986. *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*. Jakarta : PT Gramedia.
- Almond, Gabriel dan Sidney Verba. 1984. *Budaya Politik (Tingkah Laku Politik dan Demokrasi di Lima Negara)*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Faturrohman, Deden dan Wawan Sobari. 2004. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang : UMM.
- Hoogerwerf. 1988. *Politikologi*. Jakarta : Erla
- Kadir. 1994. *Penuntun Belajar PPKn*. Bandung: Pen Ganesa Exact.
- Kavanagh, Dennis. 1982. *Kebudayaan Politik*. Jakarta : PT Bina Aksara.
- Maran, Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Mas'udi. 2000. *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Yogyakarta : PT Tiga Serangkai.

- Moloeng, Lexy S. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Sanit, Arbi. 2012. *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sudijono, Anas. 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sudjana. 2005 *Statistika. Metoda*, Bandung : Tarsito.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: CV.Afabeta.
- Sukardi. 2006. *Penelitian Kualitatif-Naturalistik dalam Pendidikan*. DIYogyakarta : Penerbit usaha keluarga
- Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Sulistiyaningtyas, Fitri. 2014. *Peran Orang Tua dalam Menanamkan Kesadaran Politik pada Anaknya sebagai Pemilih Pemula di Kelurahan Tambakrejo, Kec. Simokerto, Surabaya*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya

